

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Berikut beberapa contohnya.

1. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut Kurva Lorenz, seperti yang diperlihatkan kurva di bawah ini. Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE.

Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi

pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya mendekati satu. Tabel berikut ini memperlihatkan patokan yang mengatagorikan ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

Tabel 5. Patokan Yang Mengatagorikan Ketimpangan Distribusi Berdasarkan Nilai Koefisien Gini.

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
.... < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
.... > 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Sumber : Eko, Yuli. 2009.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus

Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

dimana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

f_{p_i} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{c_i} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{c_{i-1}}$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

2. Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Kriteria Bank Dunia Mengukur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Suatu Negara.

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

Sumber : Eko, Yuli. 2009.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia.

Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu:

a) Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*).

Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatanpun turut diabaikan.

b) Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumberdaya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

- 1) Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
- 2) Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan.
Sayangnya relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar (faktor-faktor non-ekonomis) misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga (Todaro, 2003).

B. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hicks dalam kutipan Azulaidin (2003), menarik kesimpulan dari perbedaan yang umum terdapat dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan. Pendapat tersebut diperjelas dengan mengatakan bahwa perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara-negara dengan ekonomi yang terbelakang, sedangkan pertumbuhan lebih mengacu pada masalah di negara-negara maju.

Teori Schumpeter (1934) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah negara maju. Sadono Sukirno (1985), menyimpulkan perbedaan istilah dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

a) Pembangunan ekonomi yaitu:

1. Peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan GDP pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perbaikan dan modernisasi dalam struktur ekonomi (struktur produksi dan struktur kelembagaan) yang umumnya masih bercorak tradisional.

b) Pertumbuhan ekonomi yaitu:

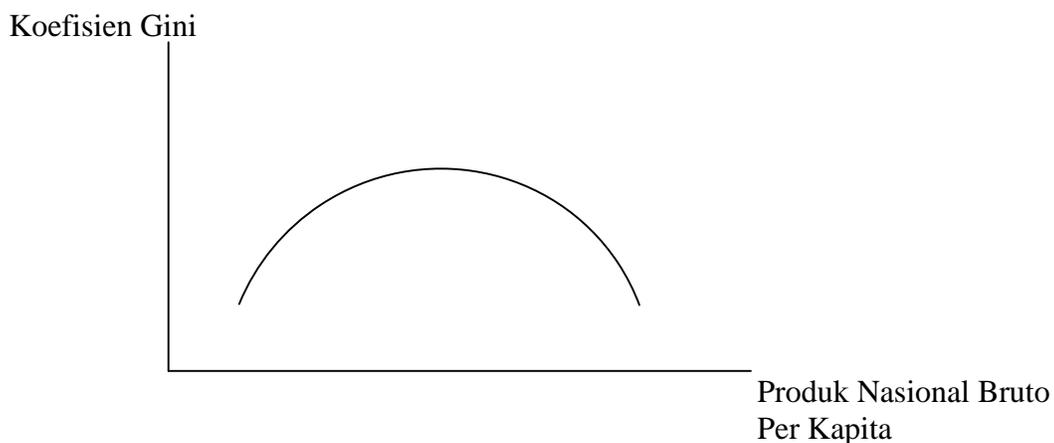
Kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, sehingga persentase pertumbuhan output tersebut harus lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita daerah (PDRB per kapita) juga harus dilibatkan berbagai faktor produksi (sumber-sumber ekonomi) dalam setiap kegiatan produksi. Pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi faktor produksi tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, teknologi dan faktor sosial (seperti adat istiadat, keagamaan, sistem pemerintahan).

Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertumbuhan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas

jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

C. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Koefisien Gini tampak seperti kurva berbentuk “U-Terbalik”, seiring dengan naiknya PDRB, seperti terlihat pada gambar.



Gambar 2. Kurva Kuznets “U-Terbalik”

Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan ini akan tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Sehingga timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah Koefisien Gini Produk nasional bruto per kapita tertentu, dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai PDRB-nya, sedangkan untuk golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya pula.

Ketimpangan pendapatan sebenarnya telah terjadi diseluruh negara di dunia ini, baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Keadaan ini antara lain dijelaskan oleh Todaro (1981), bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata

dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Nicholas Kaldor (1960), menyatakan bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang - orang miskin sehingga akan meningkatkan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan PDRB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan setimpang mungkin. Dengan demikian, model Kuznets dan Kaldor menunjukkan adanya *trade off* atau pilihan antara pertumbuhan PDRB yang lambat tatapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dua model ketimpangan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik memberikan perhatian khusus pada peranan kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik kapital kedalam daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk tumbuh sekaligus menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan

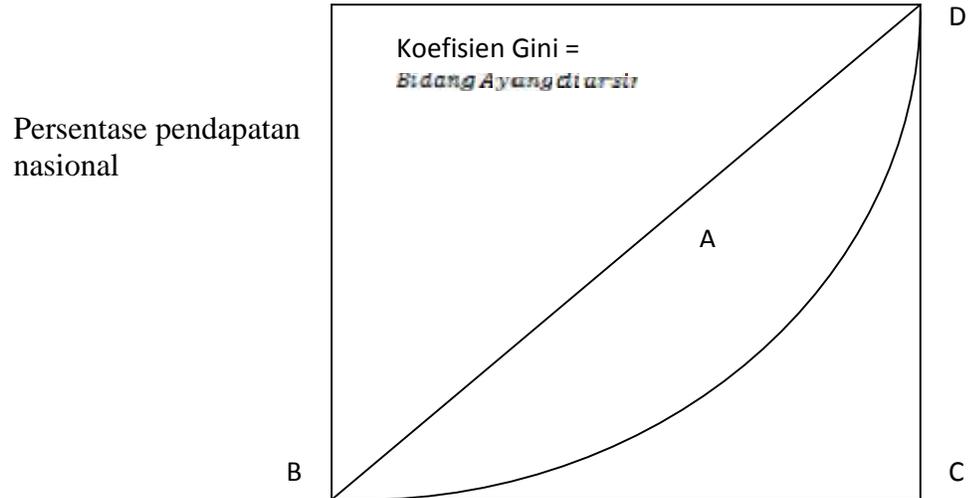
kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah dalam negara. Terjadinya ketimpangan antar daerah juga diterangkan oleh Myrdal (1957) membangun teori keterbalakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, beliau memakai ide “*spread effect*” dan “*backwash effect*” sebagai bentuk pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan kedaerah sekitar. *Spread effect* (dampak sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan kedaerah sekitar. *Backwash effect* (dampak balik) didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Terjadinya ketimpangan regional menurut Myrdal disebabkan oleh besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* dinegara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya, lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

D. Identifikasi Yang Mempengaruhi Faktor – faktor Pertumbuhan Ekonomi Koefisien Gini dan Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.

Kurvanya terletak pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk, titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut merupakan garis “pemerataan sempurna” (*perfect equality*). Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

Gambar 2.2 memperlihatkan pengukuran Rasio Gini dengan Kurva Lorenz. Indeks atau Rasio Gini adalah menjelaskan kadar pemerataan (ukuran ketimpangan) distribusi pendapatan nasional yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1.



Sumber: Pembangunan Ekonomi, 2003

Gambar 3. Pengukuran Rasio Gini dengan menggunakan Kurva Lorenz

Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau distribusi merata. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Angka Rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari Kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak di antara Kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga BCD.

Semakin melengkung Kurva Lorenz akan semakin luas area segitiga yang dibagi, rasio Gini-nya akan kian besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang.

Todaro (2003) memberikan batasan bahwa negara-negara yang ketimpangannya tinggi maka koefisien Gininya terletak antara 0,50 sampai 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang ketimpangannya relatif rendah atau merata koefisien Gini-nya terletak antara 0,20 sampai 0,35. Rasio Gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (x_{i-1} - x_i)(y_i - y_{i-1})$$

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_i + Y_{i-1}) \quad 0 < G < 1$$

Dimana :

G = Rasio Gini

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas-i

X_i = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas-i

Y_i = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas-i

Adapun jumlah rumah tangga dapat dibagi menjadi lima kelas yaitu:

1. 20 persen rumah tangga termiskin
2. 20 persen rumah tangga kedua
3. 20 persen rumah tangga ketiga
4. 20 persen rumah tangga keempat
5. 20 persen rumah tangga terkaya.

Kasus ekstrim dari ketidakmerataan sempurna yaitu apabila terdapat seseorang yang menerima seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lain sama sekali tidak menerima pendapatan, diperlihatkan oleh Kurva Lorenz yang berimpit dengan sumbu horizontal dan sumbu vertikal kanan. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun yang memperlihatkan pemerataan dan ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan sehingga dalam prakteknya, Kurva Lorenz dari setiap negara akan selalu berada disebelah kanan diagonal.

1. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam literatur-literatur kuno, pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Keberadaannya, yang dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Artinya, jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan, sedangkan dalam literatur-literatur moderen, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1996).

Menurut Ricardo dalam Jhingan (2004), pertumbuhan penduduk pada suatu saat akan mengakibatkan keadaan yang disebut dengan *stationary state*, yaitu suatu saat dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Setelah itu perekonomian akan terus menurun sampai dengan tingkat yang lebih rendah dimana upah buruh sangat minimal, hanya cukup untuk hidup (*subsistence level*). Ricardo melihat pertumbuhan penduduk dan kemerosotan pertumbuhan modal sebagai akibat bekerjanya *The Law of Diminishing Return* sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, teori Neo Klasik menganggap penduduk memberikan sumbangan yang sangat positif terhadap pembangunan, terutama karena:

1. Perkembangannya akan memperluas pasar.
2. Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya dapat menciptakan berbagai akibat yang positif kepada pembangunan.

3. Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam menciptakan pembantuan modal.

Thomas Robert Maltus dalam Todaro (2003), merumuskan sebuah konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*). Maltus menggambarkan suatu kecendrungan universal bahwasanya jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat pada deret ukur atau tingkat geometric (pelipatan ganda), kecuali jika hal tersebut terjadi oleh bencana kelaparan. Pada waktu yang bersamaan, karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmetik. Oleh karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat terpacu secara memadai atau mengimbangi kecapatan pertambahan penduduk, maka pendapatan perkapita cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit diatas tingkat subsisten (semua penghasilan hanya cukup dikonsumsi sendiri).

2. Investasi

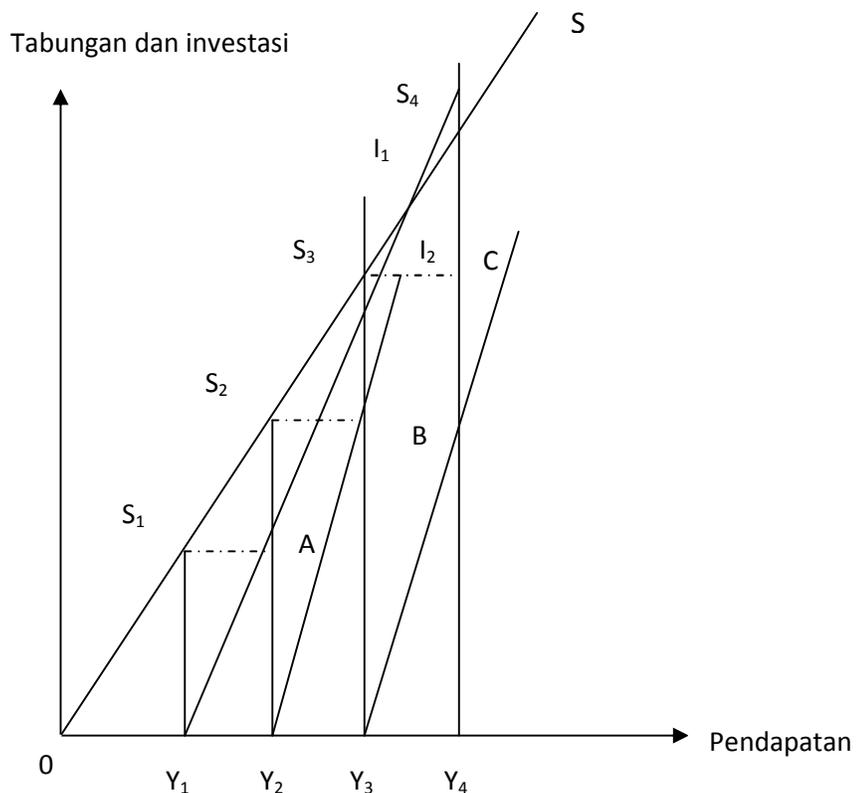
Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Modal asing dapat memasuki suatu

negara dalam bentuk modal swasta dan modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung.

Investasi langsung berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi tersebut. Sedangkan investasi tidak langsung lebih dikenal sebagai investasi *portfolio* yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga keterbelakangan teknologi. Investasi asing negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah lebih penting dari pada modal asing swasta, karena kebutuhan keuangan Negara berkembang begitu besar sedangkan investasi asing swasta hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil saja. Investasi asing swasta tidak mau terlibat dengan masalah pengeluaran sosial seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, program medis, latihan teknis dan penelitian, dan sebagainya. Sekalipun bidang-bidang tersebut secara tidak langsung meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktifitas perekonomian, tetapi dalam jangka panjang tidak memberikan keuntungan langsung dan karena itu hanya dapat diandalkan pada bantuan hibah negara maju. Investasi di bidang ini memerlukan jumlah dan resiko yang besar di mana modal swasta tidak mampu melaksanakannya (Jhingan, 2004).

Argumen yang mendukung perlunya investasi untuk pertumbuhan ekonomi di jelaskan menurut teori Harrod Domar. Teori ini menekankan perlunya investasi

dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, karena investasi menciptakan pendapatan, dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Kerena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerja penuh dari tahun ketahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas. Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur ekuilibrium pertumbuhan.



Gambar 4. model pertumbuhan Domar

Sumber: Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (2004)

Gambar 4 menjelaskan sumbu horizontal mewakili pendapatan dan sumbu vertikal mewakili tabungan dan investasi. Perubahan pendapatan dari Y1 ke Y2 mendorong investasi I1 menyamai tabungan S1 pada titik A (Y2). Investasi ini pada gilirannya, meningkatkan pendapatan ke Y3, dan Y3 mendorong I2 menyamai S2 pada B (Y3). I2 pada gilirannya menaikkan pendapatan ke Y4 dan Y4 mendorong I3 menyamai S3 pada C (tingkat pendapatan Y4). Dengan cara inilah perekonomian bergerak melalui lintasan pertumbuhan. Titik silang antara garis investasi (I) dan garis yang sejajar dengan sumbu Y menunjukkan investasi yang diperlukan pada masa berikutnya. Semakin besar proporsi tabungan, harus S4 Tabungan & Investasi Pendapatan semakin besar juga tingkat kenaikan *output*, sehingga mengundang investasi yang memadai untuk mempertahankan keseimbangan, jika koefisien investasi disumsikan tidak berubah.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G + (X-M)$. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel diruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government expenditures*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional dan seberapa

penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori Rostow dan Musgrave dalam Dumairy (1996) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dimana pada tiap tahap pemerintah berlaku sebagai penyedia infrastruktur penunjang pembangunan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah membesar. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan, yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya. Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan social seperti kesehatan dan pendidikan.

E. Otonomi Daerah

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 pasal 1 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan bagi perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pada hakekatnya penerapan prinsip ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Otonomi Daerah di kota didasarkan pada prinsip desentralisasi. Dengan tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan dan sumber pembiayaannya dari daerah sendiri. Dengan demikian, daerah leluasa mengimplementasikan kebutuhan dan aspirasi daerahnya dalam bentuk program/proyek pembangunan, yang dikenal sebagai program/proyek regional/daerah. Komponen sumber penerimaan daerah yang paling mungkin untuk melaksanakan hal tersebut adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD). Namun sumbangan PAD bagi penerimaan daerahnya relatif kecil, sehingga pembangunan di kota relatif sangat terbatas mewujudkan kebutuhan dan aspirasi daerahnya dalam bentuk program/proyek pembangunan (Purliana, 2003). Kaho (1997), menyatakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi :

1. SDM merupakan sektor esensial dari otonomi sebagai subjek dan objek dalam pelaksanaan otonomi.

2. Keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan pelaksanaan otonomi daerah karena akan menentukan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, pajak, hasil perusahaan daerah dsb.
3. Peralatan yang cukup baik, berupa prasarana dan sarana fisik yang memperlancar pembangunan.
4. Organisasi dan manajemen merupakan lembaga dan organisasi, pemerintah daerah yang akan menjadi eksekutif dan legislatif di daerah.

Menurut Koswara dalam Tambunan (2001) untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat, menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi dan potensi wilayahnya, maka lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mempelajari hasil - hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Tabel 6 merupakan ringkasan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga Ardita Mirza (2012) dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 - 2011”, dan pada tabel 7 merupakan jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh Asman Al Faiz (2011) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran,

dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008”.

Tabel 7. Ringkasan Penelitian “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan di Lampung Selatan Tahun 2006- 2011”, (Angga Ardita Mirza, S.E: 2012)

Studi	IESP
Lokasi	Bandar Lampung
Variabel	a. Dependen: Pertumbuhan Ekonomi. b. Independen : Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan.
Metode	<i>OLS</i>
Hasil Penelitian	- Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diterima - Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2006-2011 diketahui - 0.77, sehingga interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut didapat di kriteriakkan (>0,75 – 0,99): Korelasi sangat kuat.

Tabel 8. Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008”, (Asman Al Faiz, S.E: 2011)

Studi	IESP
Lokasi	Semarang
Variabel	b. Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Panjang Jalan. b. Independen : Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Pada 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat.
Metode	<i>Data Panel</i>